

Opini

Pilkada, Kekerasan dan Literasi Politik

KEHAMPAAAN MAKNA

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pilkada) akan kembali digelar secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 di 171 daerah yang tersebar pada 17 propinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Sebagaimana pada beberapa periode sebelumnya, Pilkada di tahun politik jelang Pilpres ini juga terasa hampa (nothing)—tidak ada hal istimewa yang secara politik dinantikan masyarakat pemilih (konstituen). Fenomena tersebut menjadi keniscayaan karena publik masih disajikan dengan deretan 'barang' lama, baik itu diartikan sebagai hegemoni parpol senior tanpa praksis ideologi, sejumlah nama politisi 'kutu loncat' tanpa prestasi maupun rilis visi-misi usang yang terus diulang-ulang. Apalagi jika dikaitkan dengan rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah sampai jelang masa kampanye

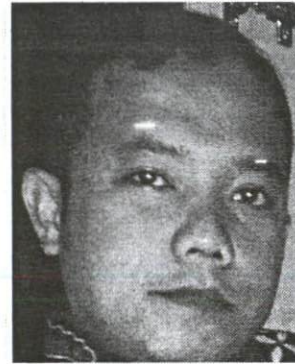
Pilkada. Tentu, hal tersebut menjadi justifikasi empiris rendahnya kualitas peradaban politik bangsa kita saat ini.

Alih-alih mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal, kehampaan makna Pilkada tahun ini justru diramaikan juga dengan serangkaian tindak kekerasan terhadap tokoh lintas agama di berbagai daerah. Memang terdapat jika fenomena tersebut dikaitkan dengan faktor legitimasi politik terhadap sejumlah calon kepala daerah dengan latar belakang TNI-Polri. Tetapi jika proses pengungkapan serangkaian tindak kekerasan oleh aparat berjalan lambat bahkan anti klimaks, maka berbagai hipotesis akan bergulir liar menjadi komoditas politik. Karena, tidak sedikit tokoh nasional yang meragukan konklusi bahwa pelaku tindak kekerasan tersebut adalah orang gila.

Publik tentu masih ingat terhadap fenomena tindak kekerasan yang terjadi di masa lampau. Mulai

dari tragedi penembakan misterius (petrus) di tahun 80-an oleh rezim Orba dengan dalih operasi pemberantasan premanisme tanpa melalui proses pengadilan, operasi pembersihan (katanya) dukun santet tahun 1998 yang berawal di Banyuwangi dan menyebar ke berbagai wilayah khususnya di Jawa Timur dan saat ini menasar para pemuka lintas agama termasuk tempat-tempat ibadah.

Sehingga, rangkaian tindak kekerasan yang terjadi sejak rezim orba berkuasa, era transisi politik reformasi sampai pada masa post-reformasi saat iniseseungguhnya telah membentuk siklus 'kambuhan' dengan hasil akhir yang sering bias. Bukan berarti menegasikan eksistensi dan kontribusi aparat, tetapi penting kiranya dibentuk semacam Tim Pencari Fakta (TPF) dengan komposisi yang mengakomodasi representasi ormas lintas agama, MUI, Komnas HAM, IDI, Asosiasi Profesi Psikologi serta akademisi yang concern terhadap isu-isu konflik sektarian, rasisme, primordialisme serta anarkisme di Indonesia. Langkah tersebut perlu diambil untuk lebih memberikan kepastian terhadap



Oleh

Hutri Agustino

DOSEN FISIP UNMUH MALANG DAN
PEGIAT LITERASI DI PONDOK SINAU LENTERA
ANAK NUSANTARA (LENSA)

proses pengungkapan fakta agar tidak kembali bias sebagaimana telah terjadi di masa lampau. Hasil laporan TPF tersebut akan mengkonfirmasi secara rasional dan obyektif tentang ada-tidaknya relasi antara momentum Pilkada di tahun politik dengan rangkaian tindak kekerasan yang terjadi.

LITERASI POLITIK

Secara tekstual, literasi sering ditafsirkan sebatas aktivitas membaca, menulis dan berhitung

(calistung). Tetapi, akhir-akhir ini makna literasi telah di elaborasi semakin kontekstual. Misalnya dalam aktivitas literasi media, literasi kultural, literasi sejarah termasuk literasi politik (political literations). Dalam konteks tersebut, pemahaman akan konsepsi pendidikan politik tentu menjadi berbeda, walaupun kedua proses tersebut memiliki tujuan akhir yang sama, yakni kecerdasan politik publik. Istilah 'pendidikan' tampak lebih normatif ketimbang 'literatif'. Selama ini pendidikan politik sering diartikan dengan berbagai kegiatan sosialisasi politik temporer yang berkaitan dengan pemahaman profil parpol peserta pemilu, profil calon kepala daerah, profil calon presiden, teknik pencoblosan yang benar dan sah versi KPU sampai terkait dengan politik uang (money politics). Tetapi, literasi politik lebih dari sekedar itu.

Dalam perspektif ilmu filsafat, dikenal beberapa pendekatan, dua diantaranya adalah pendekatan ontologis dan aksiologis. Istilah ontologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *on* atau *ontos* yang berarti ada dan *logos* yang

berarti ilmu. Bidang telaah filsafati sebagai subordinat dari proses elaborasi cabang filsafat metafisika yang mengkaji tentang hakikat. Dalam perspektif tersebut, René Descartes menyimpulkan bahwa hakikat keberadaan manusia itu ada dalam kemampuan berpikirnya. Saya berpikir, maka saya ada (*cogito ergo sum*). Dalam konteks tersebut, salah satu episentrum aktivitas literasi politik adalah level pemaknaan hakikat politik. Artinya, jika pendidikan politik relatif hanya menasar wilayah teknis-normatif, maka literasi politik sudah merambah wilayah pemaknaan hakikat-filosofis. Hal tersebut menjadi signifikan ditengah fenomena kehampaan makna politik publik sebagaimana telah diuraikan dibagian atas.

Berikutnya adalah pendekatan aksiologis yang berasal dari Bahasa Yunani, yakni: *axios* yang berarti nilai dan *logos* yang berarti ilmu. Dewasa ini, ilmu tidak hanya menunjukkan gejala dehumanisasi, tetapi juga telah mengubah hakikat kemanusiaan. Artinya, jika pada awalnya ilmu bertujuan untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidup, saat ini justru ilmu yang

memproduksi tujuan hidup itu sendiri. Dalam konteks tersebut, perlu kiranya di revitalisasi perspektif klasik Aristotelian bahwa politik harus membawa nilai guna bagi semua (*public good*), politik berguna untuk terwujudnya keadilan sosial (*social justice*) kata Socrates, politik juga jawaban atas pentingnya penegakan HAM (*Human Rights*). Politik hanya sekedar alat (*instrument*) untuk mencapai tujuan manusia (*humanity*) dan kemanusiaan (*humanity*). Politik bukan tujuan akhir (*goals*), apalagi sebatas pelayan keserakahan kekuasaan sporadis ala Machiavellism.

Dengan memahami hakikat dan nilai guna politik, maka pemahaman publik akan lebih kontemplatif. Mereka menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara politik, tetapi mampu menjadi subyek yang terbebas dari berbagai modus konspirasi politik elit, khususnya dalam proses kontestasi politik seperti Pilkada, Pileg dan Pilpres tahun depan. Literasi politik menjadi antitesis dari politik pencitraan, politik identitas, politik adu domba serta politik uang yang hanya membuat dunia politik semakin korup. (*)

Kirim opini Anda ke email redaksi@malang-post.com

Panjang Tulisan 850 kata dan jangan lupa sertakan foto diri.